



PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA  
POLA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBYEK PAJAK ( SISMOIP )  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SITUBONDO

LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG

Asal	Hadiah	Klasifikasi 351.72 ADM P
Terima Tel:	Pembelian 13 MAR 2001	
No. Induk :	102.335.448	C-1

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Annisa

NIM : 970903101153

Dosen Pembimbing

Drs. M. Rasad

NIP. 060 035 231

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2001



## UNIVERSITAS JEMBER

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

## PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

## PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji, laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

**Nama** : Annisa  
**Nim** : 970903101153  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi  
**Program Studi** : Perpajakan

Judul :

“ Pelaksanaan Pembentukan Basis Data Pola Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) di Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Situbondo “.

Pada :

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 28 Pebruari 2001  
**Jam** : 19.00  
**Bertempat** : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dan Telah Dinyatakan “ LULUS “  
Panitia Penguji :

Anggota

  
Drs. Djoko Purnomo, MSi

Nip. 130 660 777

Ketua

  
Drs. M. Rasad

Nip. 060 032 231

Mengesahkan

Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



  
Drs. H. Moch. Toerki

Nip. 130 524 832

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui laporan tugas Praktek Kerja Nyata, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

**NAMA** : ANNISA  
**NIM** : 970903101153  
**JURUSAN** : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**JUDUL** : **PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA POLA  
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBYEK PAJAK  
(SISMIOP) DI KANTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SITUBONDO**

Jember, 26 Desember 2000

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
**Drs. M. Rasad**

**NIP. 060 035 231**

*MOTTO*

*Kemajuanmu bukanlahlah karena memperbaiki apa yang telah kaulakukan, tapi mencapai apa yang belum kaulakukan.*

*(Kahlil Gibran)*

*Tuhan telah menyalakan obor dalam hatimu yang memancarkan cahaya pengetahuan dan keindahan ; sungguh berdosa jika memadamkannya dan mencampakkannya dalam abu.*

*(Kahlil Gibran)*

## *Persembahan*

*Laporan Akhbar ini ku persembahkan untuk:*

- 1. Ayahanda Tercinta almarhum Moch. Usman atas segala curahan kasih sayang dan doa semasa hidup.*
- 2. Ibunda Tersayang atas doa dan bimbingannya.*
- 3. Kakak dan adikku Tersayang, Farid, Nana, Arif dan Ratna.*
- 4. Nugroho Edy Kuswojo, atas pengertian dan kasih sayangnya.*
- 5. Hesti, Hera, dan Ayu, atas persahabatannya.*
- 6. Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul : **Pelaksanaan Pembentukan Basis Data Pola Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak ( SISMIOP ) di KP PBB Situbondo** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan Akademis pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selama pelaksanaan praktek kerja nyata sampai dengan penulisan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, Msc selaku ketua jurusan program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Djoko Pumomo, Msi selaku sekretaris program Diploma III Perpajakan Universitas Jember.
4. Bapak Drs. M. Rasad selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan masukan dan meluangkan waktu hingga terselesaikannya laporan ini.
5. Bapak Drs. Tuwardi selaku Kepala KP PBB Situbondo.
6. Bapak Sudarpo selaku Kasie Pendataan dan Penilaian .

7. Bapak Oka, bapak Bambang Wijanarko selaku pembimbing selama penulis magang, serta bapak Sentot Djajani, bapak Suhada, bapak Kasturi atas segala keterangan dan data-data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
8. Bapak Adji Sukur, bapak Bambang Tedja, Bapak Hariyanto, mas Susi, mas Hadali, mas Erwin, mas Danang, mbak Rika, mas Wawan, mas Edi, Doni, Dani dan Atta atas keakraban yang diberikan kepada penulis serta segenap karyawan KP PBB Situbondo yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
9. Bapak Drs. Parto Suyono, Ibu Sulastin dan Hesti (terima kasih tumpangannya), Sisyanti, Eli, Indah (kapan bareng lagi).

Akhir kata Penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Jember, Januari 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Lembar Persembahan.....	v
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Daftar Isi.....	viii
Halaman Daftar Lampiran.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang.....	2
1.2.1 Tujuan Program Magang.....	2
1.2.2 Kegunaan Program Magang.....	2
<b>BAB II KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Landasan Teori.....	3
2.1.1 Pengertian Pajak.....	3
2.1.2 Pengertian PBB.....	3
2.1.3 Fungsi PBB.....	4
2.1.4 Obyek PBB.....	5
2.1.5 Pengertian SISMIOP.....	5
2.1.6 Maksud dan Tujuan SISMIOP.....	6
2.2 Landasan Normatif Undang-Undang.....	6



<b>BAB III TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA</b>	
3.1 Tahap Persiapan.....	8
3.2 Tahap Pengumpulan Data.....	8
3.2.1 Kegiatan ditempat Magang .....	8
3.2.2 Metode Kepustakaan.....	9
3.3 Tahap Pengolahan Data .....	9
3.4 Tahap Analisis Data .....	9
3.5 Tahap Pengambilan Kesimpulan.....	9
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI MAGANG</b>	
4.1 Sejarah Singkat KP PBB Situbondo.....	10
4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	11
4.2.1 Sub. Bagian Tata Usaha .....	12
4.2.2 Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).....	12
4.2.3 Seksi Pendataan dan Penilaian (PEDANIL).....	13
4.2.4 Seksi Penetapan .....	13
4.2.5 Seksi Penagihan dan Penerimaan (P2).....	14
4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama .....	15
4.3.1 Pelaksanaan SISMIOP di KP PBB Situbondo .....	15
4.3.2 Struktur Organisasi Tim SISMIOP KP PBB Situbondo .....	23
4.3.3 Hasil Akhir Pelaksanaan SISMIOP di KP PBB Situbondo ...	26
4.4 Permasalahan.....	27
4.5 Alternatif Pemecahan Masalah.....	29
<b>BAB V KESIMPULAN dan SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	33
5.2 Saran .....	34
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta wilayah pelaksanaan SISMIOP dikecamatan Mlandingan KP PBB Situbondo :	
a. Peta pelaksanaan SISMIOP didesa Selomukti.....	37
b. Peta pelaksanaan SISMIOP didesa Sumberpinang .....	38
c. Peta pelaksanaan SISMIOP didesa Sumberanyar.....	39
d. Peta pelaksanaan SISMIOP didesa Campoan.....	40
e. Peta pelaksanaan SISMIOP didesa Trebungan .....	41
f. Peta pelaksanaan SISMIOP didesa Mlandingan kulon.....	42
Lampiran 2.a. Jumlah obyek pajak di kelurahan / desa wilayah pelaksanaan SISMIOP 1999 / 2000 .....	43
Lampiran 2.b. Perbandingan luas wilayah dengan luas bumi yang telah dikenakan PBB pada wilayah pelaksanaan SISMIOP .....	44
Lampiran 3. Perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah wajib pajak pada wilayah pelaksanaan SISMIOP.....	45
Lampiran 4. Struktur organisasi pembentukan obyek / subyek PBB pola SISMIOP kantor pelayanan PBB Situbondo .....	46
Lampiran 5. Bagan organisasi kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan tipe A.....	47

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Sebagaimana kita ketahui, Pajak adalah salah satu penerimaan negara sektor non migas (minyak dan gas) yang penting. Diantara pajak-pajak tersebut salah satu diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak negara yang bersifat kebendaan, pajak kebendaan pada umumnya hanya memperhatikan obyek pajaknya. Adapun obyek pajak tersebut berupa tanah dan atau bangunan. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, begitu juga bangunan akan memberikan manfaat ekonomi bagi pemilikinya. Oleh karena itu wajar bagi mereka yang memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan atau bangunan tersebut untuk menyerahkan sebagian kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. Peran PBB sebagai salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan pembangunan disegala bidang. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan suatu sistem pengolahan administrasi PBB yang lebih sederhana, sistematis serta efisien mengingat sekitar 30 juta wajib pajak yang mencakup kurang lebih 60 juta obyek pajak yang harus dikelola setiap tahunnya.

Sistem tersebut mencakup pengumpulan data (pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas obyek pajak dengan Nomor Obyek Pajak (NOP), pemeliharaan data (Up dating), sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), STTS (Surat Tanda Terima Setoran) dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) yang berkaitan dengan program SISTEP (Sistem Tempat

Pembayaran), sistem pelaporan serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak melalui satu tempat.

Didalam praktek kerja ini penulis memilih tempat praktek di daerah Situbondo, karena kebetulan di daerah tersebut telah dilaksanakan proyek SISMIOP untuk tahun anggaran 1999/2000 dan dalam laporan ini penulis akan menginformasikan segala kegiatan dan masalah yang timbul selama pelaksanaan proyek SISMIOP di KP PBB Situbondo berdasarkan keterangan-keterangan dan data-data yang diperoleh dari petugas yang bersangkutan selama pelaksanaan proyek SISMIOP tersebut. Sesuai dengan uraian diatas maka laporan PKN ini diberi judul " Pelaksanaan pembentukan basis data pola Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMICP) di KP PBB Situbondo ".

## **1.2 Tujuan dan kegunaan Program Magang**

### **1.2.1 Tujuan program magang :**

- a. Untuk melatih kerja dan memperoleh pengalaman kerja selama magang di KP PBB Situbondo.
- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan proyek SISMIOP di KP PBB Situbondo.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan praktis yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek SISMIOP di KP PBB Situbondo.

### **1.2.2 Kegunaan program magang :**

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diharapkan :

#### **a) . Bagi Mahasiswa**

- Menambah wawasan dan pengetahuan serta gambaran lebih jelas mengenai tata cara dan prosedur kerja di KP PBB Situbondo pada umumnya dan mengenai pelaksanaan proyek SISMIOP pada khususnya.
- Menambah pengalaman kerja.

#### **b) . Bagi Instansi**

Dengan adanya Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi instansi tersebut.

## BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

### 2. 1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pajak adalah

luran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

( Menurut Prof.Dr. Rochmat soemitro,SH : 1 )

#### 2.1.2 Pengertian PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak negara yang bersifat kebendaan, oleh sebab itu yang di perhatikan adalah obyek pajaknya. Obyek pajak di sini berupa tanah, bumi dan atau bangunan.

1. Yang dimaksud Bumi disini adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya yaitu permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah Indonesia.
2. Bangunan adalah kontruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Termasuk dalam bangunan ini adalah :

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olahraga.
- f. Galangan kapal, dermaga.
- g. Taman mewah.
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i. Fasilitas yang memberikan manfaat.

## 2.1.3 Fungsi PBB adalah :

- a. PBB merupakan pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati masyarakat daerah tersebut.
- b. Merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian 10% untuk pemerintah pusat serta 90% untuk pemerintah daerah Tk II dan pemerintah daerah Tk I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.
- c. Sebagai penerimaan pemerintah daerah yang sebagian besar diberikan kepada pemerintah Tk II, maka penerimaan pajak ini dicurahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah Tk II yang bersangkutan.

Imbalan pembagian hasil penerimaan PBB diatur dengan peraturan pemerintah No. 47 tahun 1985 tanggal 27 desember 1985 . Hasil pembagian penerimaan PBB antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai berikut :

- 1). Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara (100%).
- 2). 10% dari (1) untuk pemerintah pusat dan disetor sepenuhnya ke kas negara.
- 3). 90% dari (1) untuk pemerintah daerah.
- 4). 90% untuk pemerintah daerah tersebut masih harus dikurangi dengan 9% ( $10\% \times 90\%$ ) untuk biaya pemungutan, sisanya untuk :
  - Untuk pemerintah daerah Tk I 16,2% ( $20\% \times 81\%$ )
  - Untuk pemerintah daerah Tk II 64,8% ( $80\% \times 81\%$ )
- 5). Pajak tersebut merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

## 2.1.4 Obyek PBB

Menurut UU No.12 tahun 1985 pasal 2 obyek PBB adalah Bumi dan atau Bangunan, untuk bumi dan atau bangunan tersebut dikelompokkan / diklasifikasikan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

## 2.1.5 Pengertian Sismiop

Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak ( Sismiop ) adalah suatu sistem yang terintegrasi sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pengolahan informasi data obyek / subyek pajak dengan bantuan komputer, pemberian identitas obyek pajak (NOP), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran ( berupa SPPT , STTS , DHKP dan sebagainya ), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat (PST).

## 2.1.6 Maksud dan Tujuan Sismiop

Masalah Administrasi adalah masalah yang rumit, sehingga dengan diterapkannya Sismiop ditujukan untuk :

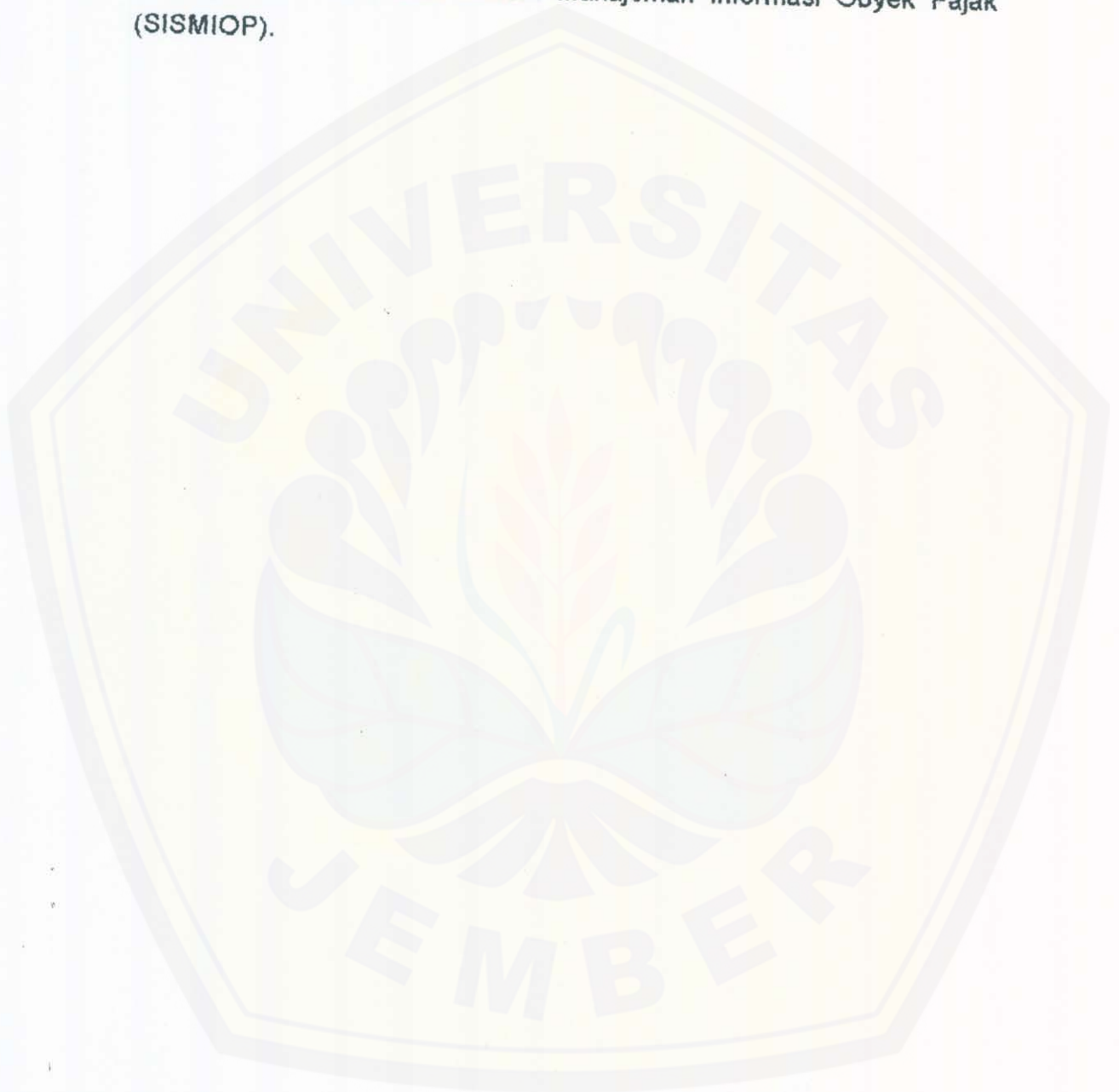
- (1). Untuk mengintegrasikan seluruh aktifitas administrasi PBB dengan bantuan komputer sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien.
- (2). Dengan diterapkan SISMIOP diharapkan dapat tercipta :
  - a. Pengenaan yang adil dan merata.
  - b. Peningkatan ketetapan.
  - c. Administrasi yang tertib sehingga memudahkan dalam penagihan yang dan diharapkan penerimaan akan meningkat.

## 2.2 Landasan Normatif Undang-Undang

- a. Undang-Undang No.12 tahun 1985 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 , tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998  
Tentang penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan PBB.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep.04/PJ.6/1998 tanggal 16 juni 1998 , tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian obyek dan subyek PBB dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP).
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE.28/PJ.6/1992 tanggal 12 juni 1992, tentang petunjuk teknis Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE.38/PJ.6/1993 tanggal 30 juni 1993 , tentang petunjuk teknis pengukuran dan identifikasi obyek pajak PBB.



- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE.15/PJ.6/1998 tanggal 17 juni 1998 , tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian obyek dan subyek PBB dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP).



### BAB III

## TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

### 3.1 Tahap Persiapan

#### a. Studi kepustakaan

Merupakan studi terhadap buku-buku yang ditulis para ahli yang berlaku umum atau teori-teori yang diakui kebenarannya yang dapat digunakan untuk menentukan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penelitian dan juga untuk memperkaya diri.

#### b. Menentukan lokasi atau daerah magang

Kegiatan magang ini dilakukan di KP PBB Situbondo.

#### c. Observasi pendahuluan

Observasi pendahuluan ini dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan SISMIOP dan permasalahannya yang mungkin timbul didalam pelaksanaan SISMIOP di KP PBB Situbondo.

### 3.2 Tahap Pengumpulan Data

Metode ini merupakan suatu cara bagaimana menemukan sesuatu dan menjalankan kegiatan untuk memperoleh data yang konkrit.

Metode pengumpulan data dalam penulisan laporan ini adalah :

#### 3.2.1 Kegiatan ditempat Magang

##### 1. Observasi atau pengamatan

Yaitu Partisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan (bukan dilapangan).

##### 2. Interview atau Wawancara

Yaitu Suatu metode untuk memperoleh data dengan cara wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu yang ditujukan kepada aparat pajak di KP PBB Situbondo.

## 3. Dokumentasi

Yaitu Suatu metode untuk memperoleh data dalam bentuk tertulis.

### 3.2.2 Metode kepustakaan

yaitu Cara pengumpulan data melalui kajian kepustakaan dan bahan literatur lainnya seperti Undang-Undang Perpajakan, Surat Edaran Menteri Keuangan RI, Surat Edaran Dirjen Pajak, majalah berita pajak dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas dalam laporan ini.

### 3.3 Tahap Pengolahan Data

Dari semua data ini analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu analisis yang diperoleh dari interview dan studi literatur yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis yang selanjutnya dianalisa untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dikaji.

### 3.4 Tahap Analisis Data

Menurut Moh. Nazir (1988:419) analisa adalah " mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca ". Analisa data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah diskriptif. Menurut Marzuki (1995:8) pengertian analisa secara diskriptif adalah " penelitian yang hanya akan melukiskan keadaan obyek, persoalan dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum ".

### 3.5 Tahap Pengambilan Kesimpulan

Dalam tahap ini penulis menggunakan metode deduksi yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

#### 4.1 Sejarah singkat KP PBB Situbondo

Kantor Pelayanan PBB Situbondo dibawah naungan Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur, merupakan pecahan kantor Ipeda pengenaan Jember mempunyai wilayah kerja di Dati II Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Kemudian untuk memudahkan pelayanan wajib pajak maka pada tahun 1975 didirikan kantor Ipeda Pengenaan di Situbondo.

Pada tahun 1976 kantor Ipeda Pengenaan Situbondo berubah menjadi kantor dinas luar tingkat I Ipeda Situbondo. Seiring dengan perkembangan jaman maka pada tahun 1986 berubah lagi menjadi kantor dinas luar tingkat I PBB Situbondo yang wilayahnya terdiri dari 17 kecamatan dan 136 desa.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276 / KMK. 01 / 1989 tanggal 20 maret 1989 maka berubah menjadi Kantor Pelayanan PBB tipe B dengan wilayah kerja yang masih sama. Pada tanggal 1 april 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 162 / KMK.01 / 1997 maka Kantor Pelayanan PBB Situbondo berubah lagi menjadi Kantor Pelayanan PBB tipe A sampai sekarang.

Kantor Pelayanan PBB Situbondo terletak didaerah yang strategis dimana kantor tersebut mudah dijangkau oleh wajib pajak dari mana saja yang mempunyai masalah, ingin mendapatkan informasi lebih lengkap atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan PBB. Adapun lokasi kantor tersebut beralamat di jalan Argopuro 41 Situbondo.

## 4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi yang ada di KP PBB Situbondo disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94 / KMK.01 / 1994 tanggal 29 maret 1997 untuk menjadi KP PBB tipe A.

Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka akan membawa keuntungan terhadap pelaksanaan sistem manajemen, misalnya :

- a. Mempermudah pengawasan bagi pimpinan.
- b. Memperjelas hubungan kerja dan koordinasi.
- c. Setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Setiap pegawai dapat mengetahui dengan jelas tanggung jawabnya masing-masing.
- e. Masing-masing pegawai dapat bekerja sesuai dengan bidang yang telah ditentukan.

Struktur organisasi yang berlaku di KP PBB Situbondo adalah seperti terlihat pada lampiran 5 .

**Jumlah dan Jenis pegawai KP PBB Situbondo**

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Kepala Kantor PBB	1
2.	Sub Bagian Tata Usaha	4
3.	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	4
4.	Seksi Pendataan dan Penilaian	3
5.	Seksi Penetapan	4
6.	Seksi Penerimaan dan Penagihan	4
7.	Seksi Pengurangan dan Keberatan	4
8.	Tenaga Fungsional dan Penilai PBB	1
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

Sumber Data : KP PBB Situbondo

Kepala KP PBB Situbondo adalah pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang dibawah pengawasan dan tanggung jawab kepala kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur, dimana tugasnya adalah melaksanakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak dibidang PBB dalam daerah wewenangnya dengan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pada kantor pelayanan PBB Situbondo terdapat 1 Sub bagian, 5 Seksi, 1 kelompok Tenaga Fungsional Penilai PBB.

Berdasarkan gambar struktur organisasi pada KP PBB Situbondo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### 4.2.1 Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas mengatur urusan tata usaha, kepegawaian, laporan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan untuk memperlancar tugas kantor tersebut.

Untuk melaksanakan tugas kantor tersebut Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengurusan Tata Usaha dan Kepegawaian
- b. Pengurusan Keuangan
- c. Pengurusan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Jadi semua urusan intern pada kantor ini menjadi tugasnya termasuk pengurusan keluar masuknya surat / laporan, supplies perlengkapan kantor (berkas/blangko, gaji pegawai dan lain-lain).

#### 4.2.2 Seksi Pengolahan Data dan Informasi ( PDI )

Bagian ini bertugas melakukan urusan pengolahan data, analisa dan penyajian informasi PBB. Untuk melaksanakan tugasnya maka seksi Pengolahan Data dan Informasi ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengolahan data masukan dan keluaran
- b. Melakukan perekaman dan pengolahan data PBB

## c. Melakukan analisa dan penyajian informasi PBB

Data-data dari seksi Pendataan dan Penilaian kemudian diserahkan kepada Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk diadakan perekaman dan dinilai dikomputer.

Sementara itu data kelima sektor yang dapat diolah untuk dikeluarkan antara lain STTS, SPPT, dan DHKP oleh komputer hanya sektor pedesaan dan perkotaan. Sedang sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan dalam menentukan besarnya pajak terhutang masih dikerjakan secara manual pada seksi penetapan.

### 4.2.3 Seksi Pendataan dan Penilaian ( PEDANIL )

Seksi ini bertugas melakukan urusan pendataan obyek dan subyek pajak. Untuk menyelesaikan tugasnya maka seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pendaftaran dan Tata Usaha pendataan obyek dan subyek PBB
- b. Pengumpulan data potensi PBB
- c. Verifikasi dan reklasifikasi NJOP

### 4.2.4 Seksi Penetapan

Tugas seksi ini menetapkan dan memproses besarnya pokok ketetapan pada setiap sektor disetiap desa dan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi penetapan PBB.

Seksi penetapan ini berfungsi antara lain :

- a. Penetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan
- b. Penetapan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan PBB

Pada seksi ini bertugas menetapkan dan memproses besarnya pokok ketetapan pada setiap sektor pada setiap desa.

## 4.2.5 Seksi Penerimaan dan Penagihan ( P2 )

Bertugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak, penerimaan, restitusi penagihan dan penyelesaian usul penghapusan piutang PBB.

Seksi Penerimaan dan Penagihan berfungsi sebagai berikut :

- a. Penata usahaan penerimaan, pembagian, penerimaan, penetapan dan penyeteroran restitusi dan kompensasi.
- b. Penata usahaan piutang pajak dan penyelesaian untuk penghapusan piutang PBB.
- c. Penagihan PBB.

Dengan fungsi tersebut diatas maka seksi ini selalu mengadakan pengawasan atau pemantauan terhadap penerimaan PBB yang disetorkan kepada tempat pembayaran yang ditunjuk, dimana perkembangan realisasi penerimaan dan realisasi tunggakan pada setiap minggu, setiap bulan dan setiap akhir anggaran akan dapat diperoleh. Dalam seksi penerimaan dan penagihan ini terbagi menjadi 3 sub bagian, antara lain :

- a. Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi dimana dalam tugasnya sub seksi ini selalu melaporkan perkembangan realisasi ke pusat yang diperoleh dari tempat pembayaran ke KP PBB.
- b. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak dalam tugasnya sub seksi ini melakukan urusan piutang pajak yang belum terlunasi oleh wajib pajak sampai pada tugas akhirnya yaitu melakukan penyidikan dan peletangan.
- c. Sub Seksi Penagihan dimana sub seksi ini bertugas melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang dengan sengaja lalai dengan kewajiban pembayaran pajaknya.





### 4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini penulis menuliskan laporan berdasarkan data-data dan keterangan-keterangan yang berasal dari Seksi Pendataan dan Penilaian ( PEDANIL ). Uraian dari tugas PEDANIL adalah :

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, seksi ini bertugas melakukan urusan pendataan obyek dan subyek pajak. Untuk menyelesaikan tugasnya maka seksi pendataan dan penilaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pendaftaran dan tata usaha pendataan obyek dan subyek PBB.
- b. Pengumpulan data potensi PBB.
- c. Verifikasi dan reklasifikasi NJOP.

Seksi ini terdiri dari 2 subseksi, yaitu :

- a. Sub seksi klasifikasi
- b. Sub seksi monografi

Pada setiap kegiatan pekerjaan di KP PBB selalu dimulai dari seksi ini, dimana seksi inilah yang melakukan pendataan terhadap semua subyek dan obyek pajak, baik yang lama maupun yang baru.

Data yang masuk pada seksi ini diadakan penilaian klasifikasi. Didalam penentuan klasifikasi perubahan obyek dan subyek ini juga dibantu oleh pihak tertentu misalnya camat, notaris selaku pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ) guna pemutakhiran data dimana dalam perkembangannya subyek dan obyek selalu mengalami perubahan yang dikarenakan jual beli, diwariskan, hibah dan sebagainya.

#### 4.3.1 Pelaksanaan SISMOP di KP PBB Situbondo

Kegiatan pembentukan basis data adalah suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data yang sesuai dengan ketentuan SISMOP ( pendaftaran, pendataan, penilaian, serta pengolahan data obyek dan subyek PBB ), dengan bantuan komputer pada suatu wilayah tertentu.

Keberhasilan dalam penerimaan PBB tidal lepas dari adanya suatu basis data obyek atau subyek pajak yang akurat dan up to date, tepat waktu, handal dan mutakhir.

Berdasarkan asas perpajakan nasional, yaitu asas self assesment yaitu asas yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran perpajakan secara adil, maka dalam pengenaan PBB salah satu implementasinya dari asas tersebut adalah dengan jalan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri obyek pajak yang dikuasai atau dimiliki atau dimanfaatkannya.

PBB menangani jumlah obyek pajak dengan jumlah yang cukup besar dan terdiri dari wajib pajak dengan beraneka ragam tingkat pendidikan dan pengetahuan, sehingga belum seluruh wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan obyek pajak yang dikuasai / dimiliki dan atau dimanfaatkan tersebut.

Sejalan dengan maksud itu KP PBB Situbondo telah melaksanakan SISMIOP mulai tahun anggaran 1994/1995, dan dalam tahun anggaran 1999/2000 ini melaksanakan SISMIOP didesa-desa dalam wilayah kecamatan Mlandingan, dengan menggunakan dana biaya operasional (BO) KP PBB Situbondo tahun anggaran 1999/2000, dimana diwilayah Mlandingan terdiri dari 7 desa tetapi SISMIOP dilaksanakan pada 6 desa saja mengigat keterbatasan dana yang tersedia. Untuk lebih jelasnya mengenai perincian wilayah pelaksanaan SISMIOP dapat dilihat pada lampiran 1a,1b.1c,1d,1e,1f.

Sedangkan alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya pendataan dalam rangka SISMIOP diwilayah tersebut antara lain adalah :

- a. Diwilayah tersebut data obyek dan subyek pajak sudah tidak akurat.
- b. Terjadinya peningkatan NJOP baik burni dari atau bangunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai sehubungan dengan dilaksanakannya pendataan obyek dan subyek pajak dalam rangka pelaksanaan SISMOP ini adalah :

1. Memperbaiki data obyek dan subyek pajak.
2. Pengenaan pajak yang lebih adil dan merata.
3. Peningkatan realisasi potensi atau pokok ketetapan PBB.
4. Memberi pelayanan lebih baik kepada wajib pajak.

Sebenarnya potensi pengenaan di wilayah kecamatan Mlandingan (6 desa/kelurahan) yang telah dilaksanakan proyek SISMOP ini masih sangat besar karena pada kenyataannya berdasarkan data, luas wilayah kecamatan Mlandingan (6 desa/kelurahan) dibanding luas bumi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut :

Luas wilayah yang telah dikenakan PBB	20.096.822 M <sup>2</sup>
Luas wilayah kecamatan Mlandingan (kecuali desa Alas bayur)	76.570.000 M <sup>2</sup>
$\frac{20.096.822}{76.570.000}$	$\times 100 \% = 26,25 \%$

Dari kenyataan data diatas belum seluruh wilayah kecamatan Mlandingan (kecuali desa Alas bayur) tersebut telah dikenakan PBB, sedang sisanya sebesar 73,75% bebas pajak (termasuk tanah negara yang digunakan untuk pemerintah, kuburan, dan lain-lain).

Sementara itu berdasarkan data dari kantor statistik kabupaten Situbondo, jumlah penduduk di wilayah kecamatan Mlandingan (6 desa/kelurahan) adalah sebesar 19.702 jiwa dengan jumlah wajib pajak / obyek pajak sebanyak 8.997 obyek pajak (sebelum SISMOP), dan itu berarti perbandingannya :

$$\frac{8.997}{19.702} \times 100 \% = 45,67 \%$$

Setelah pelaksanaan proyek SISMIOP tahun anggaran 1999/2000, ternyata diperoleh peningkatan jumlah wajib pajak / obyek pajak di wilayah kecamatan Mlandingan yaitu dari yang semula sebesar 8.997 wajib pajak / obyek pajak menjadi sebesar 12.210 wajib pajak/obyek pajak baru. Maka peningkatan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan SISMIOP tersebut adalah :

$$\frac{3.213}{19.702} \times 100 \% = 16,30 \%$$

Dengan adanya peningkatan ini maka sasaran yang ingin dicapai adalah pengenaan pajak yang lebih adil dan merata disamping peningkatan pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan, serta memudahkan penagihan terhadap wajib pajak. Secara terperinci perbandingan antara luas wilayah dengan luas bumi yang telah kena PBB dan perbandingan antara jumlah penduduk dan jumlah wajib pajak dapat dilihat pada lampiran 2 dan 3.

Dalam pelaksanaan pendataan obyek PBB ada 4 alternatif pilihan yang dapat digunakan :

(1). Penyebaran SPOP

Untuk daerah / wilayah yang belum mempunyai peta, terpencil dan mempunyai potensi PBB yang relatif kecil.

SPOP berdasarkan pasal 9 UU No. 12 tahun 1985 yang telah disempurnakan dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang PBB adalah surat yang dipergunakan oleh subyek/wajib pajak untuk melaporkan data obyek dan subyek pajaknya kepada KP PBB menurut ketentuan UU No. 12 tahun 1985 yang disempurnakan menjadi UU No. 12 tahun 1994 tentang PBB.

(2). Dengan Identifikasi Obyek Pajak

Dilakukan pada daerah atau wilayah yang sudah memiliki peta garis / peta foto yang dapat menentukan posisi relatif obyek pajak, namun tidak mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil pendataan 3 tahun terakhir secara lengkap.

(3). Vertifikasi obyek pajak

Dilakukan pada daerah atau wilayah yang sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil pendataan 3 tahun terakhir secara lengkap.

(4). Pengukuran bidang obyek pajak

Dilakukan pada daerah atau wilayah yang hanya memiliki sket desa / kelurahan, sehingga belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif obyek pajak, namun letaknya strategis dan mempunyai potensi PBB yang pesat.

Da.i ke 4 alternatif diatas pelaksanaan SISMOP di KP PBB Situbondo menggunakan konsep sket / peta blok, dimana petugas mengadakan pengukuran batas-batas obyek pajak.

Tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan pendataan SISMOP di KP PBB Situbondo

A. Persiapan

1). Penelitian pendahuluan dan penyusunan rencana kerja

- Kegiatan dalam penelitian pendahuluan meliputi pengumpulan data dan informasi mengenai :

- a. Jumlah penduduk
- b. Jumlah wajib pajak
- c. Luas wilayah
- d. Luas tanah telah kena PBB
- e. Luas bangunan kena PBB

f. Harga jual obyek pajak tertinggi dan terendah

g. Harga material dan standart upah yang berlaku

- Rencana kerja disusun sebagai pedoman dalam kegiatan pembentukan basis data.

Basis data adalah data seluruh obyek dan subyek PBB dalam suatu wilayah pemerintahan tertentu yang disimpan dalam media komputer.

## 2). Pengadaan peta desa / kelurahan

- Data desa/kelurahan sangat diperlukan dalam penentuan blok dan pembuatan konsep ZNT (Zona Nilai Tanah) serta pemberian NOP (Nomor Obyek Pajak).

a. Blok adalah sekelompok obyek pajak yang dibatasi oleh batas yang tidak mudah berubah baik batas alam atau buatan manusia, seperti : jalan, selokan, sungai dan sebagainya (khusus untuk kepentingan PBE) dalam wilayah administrasi desa/kelurahan.

b. ZNT adalah suatu wilayah/kelompok areal tanah yang mempunyai nilai indikasi rata-rata (NIR) yang sama (dengan variasi lebih kurang 10%) dalam satu desa/kelurahan. Zona nilai tanah tidak terpaku pada batas blok, dapat mempunyai wilayah atau luas yang sama, lebih besar atau lebih kecil dari blok.

c. NOP adalah nomor identifikasi obyek pajak (termasuk obyek PBB yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 12 tahun 1994) yang mempunyai karakteristik unik, permanen dan standar dengan satuan blok dalam wilayah desa/kelurahan yang berlaku secara nasional.

## 3). Pembuatan konsep peta ZNT / NIR

- Pembuatan konsep peta ZNT didasarkan pada data harga jual tanah yang sudah ada dan masih sesuai dengan keadaan terakhir, apabila

belum maka pembuatannya dilakukan sesuai dengan data harga jual tanah yang terbaru.

Yang dimaksud NIR (Nilai Indikasi rata-rata) adalah nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.

#### 4). Pengadaan peta blok

- Pengadaan peta blok diperlukan untuk mengetahui batasan-batasan tiap obyek pajak.

Peta blok adalah peta yang menggambarkan bidang-bidang obyek pajak (tanah dan atau bangunan) beserta masing-masing nomor obyek pajaknya dalam wilayah administrasi desa/kelurahan.

#### 5). Pelatihan petugas / pegawai

- Pelatihan petugas pelaksana dilapangan diperlukan dalam hal jumlah tenaga yang ada di KP PBB Situbondo sendiri tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, maka disamping dilaksanakan oleh tenaga organik diambil juga tenaga dari luar / honorer. Khusus untuk petugas pendata ini diambil dari tenaga-tenaga lulusan SLTA yaitu SMU dan STM yang telah terdidik dengan baik/berpengalaman.

Pelatihan bagi para petugas pendata tersebut dengan cara :

1. Pemberian materi tentang pengukuran dan pendataan
2. Praktek pelaksanaan pekerjaan lapangan

#### 6). Penyuluhan

- Penyuluhan diberikan kepada para camat, lurah serta masyarakat luas yang bertujuan memberikan informasi tentang pelaksanaan SISMIOB.

## B. Pekerjaan Lapangan

Penyampaian dan pengembalian SPOP, pengukuran obyek pajak dan pembuatan Net konsep peta blok.

Pelaksanaannya adalah dengan menyampaikan SPOP kepada wajib pajak dan atau kuasanya untuk diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib pajak dan atau kuasanya. Mengambil kembali SPOP yang telah diisi dan di tanda tangani oleh wajib pajak dan atau kuasanya. Untuk meneliti kebenaran pengisian SPOP dan selanjutnya diadakan pengukuran obyek. Pembuatan Net konsep peta blok dengan skala 1 : 2000 atau 1 : 2500 untuk pedesaan diatas kertas milimeter.

## C. Pekerjaan Kantor

Adapun urutan pekerjaan yang dilaksanakan di kantor setelah pekerjaan lapangan adalah sebagai berikut :

### 1. Perekaman data dan Pencetakan DHR.

#### 1.1 Perekaman data (entry data)

SPOP / LSPOP yang akan direkam haruslah sudah diperiksa dan telah di tanda tangani oleh koordinator pekerjaan lapangan apabila ada data yang tidak dapat masuk dalam komputer , maka akan dikembalikan kepada koordinator pekerjaan lapangan untuk dibetulkan.

#### 1.2 Pencetakan daftar hasil rekaman ( DHR )

Pencetakan DHR dilaksanakan setelah semua data dari SPOP / LSPOP direkam dalam komputer dan diproses sebagai mana mestinya. DHR ini memuat item-item tentang obyek dan subyek pajak ; seperti NOP, nama wajib pajak dan besarnya ketetapan pajak.



## 1.3 Validasi DHR

Setelah data-data obyek dan subyek pajak direkam maka dilaksanakan kegiatan validasi (penelitian), kegiatan ini dilakukan oleh petugas peneliti dan apabila ada kesalahan DHR, maka harus dikembalikan kepada petugas entry agar diperbaiki, maka hasil validasi dikembalikan kepada petugas peneliti.

## 1.4 Pembuatan peta desa , peta ZNT dan penggandaan

Pembuatan peta desa dibuat berdasarkan Net konsep peta blok, dengan cara menggambarkan batas-batas blok saja, tanpa digambar perbidang obyek. Dan setelah itu dicantumkan batas ZNT serta kode ZNT kemudian digandakan.

## 1.5 Penggambaran peta blok / ZNT dan penggandaan

Penggambaran peta blok atau ZNT berdasarkan Net konsep batas ZNT setiap blok. Masing-masing garis batas ZNT diberi warna sesuai ketentuan, dan dilakukan penggandaan.

## 1.6 Konsep SK. KAKANWIL

Dari hasil kesemuanya diatas dapat diketahui klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang kemudian disusun diajukan kepada Kades, Camat, Bupati kepala daerah Tk II untuk memperoleh persetujuan / rekomendasi. Selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kanwil IX DJP sebagai data pendukung pembuatan SK. Kepala Kanwil IX DJP mengenai penentuan dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan PBB tahun 2000.

## 4.3.2 Struktur Organisasi tim SISMIOP KP PBB Situbondo

Organisasi pembentukan basis data dalam rangka SISMIOP di KP PBB Situbondo, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh keputusan Dirjen Pajak yaitu Kep. 04 / PJ.6 / 1998 tanggal 16 juni 1998 perihal petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian obyek / subyek PBB dalam

rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP, disebutkan bahwa apabila jumlah obyek pajak yang akan didata lebih kecil atau sama dengan 50.000 obyek pajak maka pelaksanaannya secara fungsional diserahkan kepada seksi Pendataan dan Penilaian ( PEDANIL ).

*Personi yang dilibatkan dalam pelaksanaan SISMIOP tersebut terdiri dari :*

- 1). Kepala KP PBB
  - a). Menyusun rencana kerja pelaksanaan SISMIOP kemudian disampaikan kepada Kakanwil IX DJP.
  - b). Melaksanakan SISMIOP setelah rencana kerja disetujui Kakanwil IX DJP.
  - c). Mengajukan permintaan pencairan dana biaya operasional kepada Kakanwil IX DJP.
  - d). Menyampaikan surat pertanggung jawaban kepada Kakanwil IX DJP.
  - e). Melakukan pengawasan atas pelaksanaan SISMIOP.
  - f). Membuat laporan bulanan kemajuan fisik dan keuangan mengenai pelaksanaan SISMIOP kepada Kakanwil IX DJP.
- 2). Bendahara
  - a). Menerima, menyimpan dan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar yang telah ditentukan dan disetujui oleh KP PBB.
  - b). Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara berkala setiap bulan kepada KP PBB dan mengelola keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 3). Kepala seksi Pedanil
  - a). Menyusun rencana kerja pelaksanaan SISMIOP berdasarkan hasil penelitian pendahuluan.
  - b). Menyampaikan rencana kerja kepada KP PBB untuk mendapatkan persetujuan sebelum dikirim kepada Kakanwil IX DJP.

- c). Memberikan arahan, bimbingan atau petunjuk kepada para pelaksana SISMIOP.
  - d). Mengawasi pelaksanaan SISMIOP.
  - e). Membuat laporan secara berkala mengenai hasil SISMIOP, serta keuangan kepada Kakanwil IX DJP.
- 4). Pelaksanaan lapangan , Operator Console / Data Entry (Petugas komputer)

### *4.1 Pelaksana lapangan*

- a). Petugas membuat konsep sket / peta desa / kelurahan bertugas melaksanakan pembuatan konsep sket / peta desa / kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b). Petugas pembuatan konsep sket / peta ZNT bertugas melaksanakan pembuatan konsep sket / peta ZNT dan daftar NIR berdasarkan harga jual tanah yang dikumpulkan / data lainnya.
- c). Petugas pengumpul data bertugas melaksanakan pekerjaan pembuatan NET konsep peta blok / ZNT perblok dan pengumpulan data dilapangan dalam rangka pembentukan SISMIOP sesuai rencana kerja dan ketentuan yang berlaku.
- d). Petugas pembuat sket / peta desa / kelurahan bertugas melaksanakan pembuatan sket / peta desa / kelurahan, sket / peta blok dan sket / peta ZNT.

### *4.2 Operator Console / Data Entry ( Petugas komputer )*

- a). Petugas Operator Console bertugas mengkoordinir masalah teknis komputer dan data entry yang terlibat langsung dalam kegiatan perekaman SPOP / LSPOP kedalam komputer.
- b). Petugas operator data entry bertugas melaksanakan perekaman data dari SPOP, validasi DHR dan pencetakan hasil keluaran berupa DHR yang telah divalidasi.

Untuk lebih jelasnya struktur tim pelaksanaan SISMIOP kabupaten Tk II Situbondo tahun 1999/2000 adalah seperti yang tercantum dalam lampiran 4.

#### 4.3.3 Hasil akhir pelaksanaan SISMIOP di KP PBB Situbondo

Hasil akhir pendataan obyek dan subyek PBB ini berupa :

##### 1. Fisik

1.1. Perangkat keras administrasi PBB berupa :

- a. Peta zona nilai tanah (ZNT).
- b. Peta desa.
- c. Peta blok.
- d. SPOP dan LSPOP.
- e. Buku klasifikasi NJOP.

1.2. Basis data obyek dan subyek PBB, berupa :

- a. Hasil rekaman obyek dan subyek PBB.
- b. Daftar Hasil Rekaman ( DHR ).
- c. Back up Data.

##### 2. Non Fisik

Dari hasil non fisik diharapkan diperoleh :

- a. Adanya peningkatan pokok ketetapan PBB yang diraih sebesar kurang lebih 20 %.
- b. Adanya peningkatan tertib administrasi.
- c. Adanya pengenaan PBB yang lebih adil dan merata.
- d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
- e. Kemudahan dalam penagihan PBB.

##### 3. Lain-lain

Pelaksanaan SISMIOP ini dapat memberi informasi dan atau hasil keluaran lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB dengan cepat dan memadai pada wajib pajak sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan terutama bagi wajib pajak yang membutuhkan.



#### 4.4 Permasalahan

Permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan SISMOP di KP PBB Situbondo yaitu :

1. *Jumlah Obyek dan Subyek PBB yang sangat besar*

Jumlah Obyek dan Subyek PBB yang sangat besar menimbulkan kesulitan dalam hal pendataan dan penilaian obyek dan subyek PBB, hal ini sangat tidak seimbang dengan jumlah aparat atau petugas pajak yang terbatas. Sehingga masih ada wajib pajak yang belum terjangkau datanya, terutama di daerah-daerah yang terpencil, padahal potensi mereka cukup besar.

2. *Adanya Sebagian Obyek keadaannya berbukit-bukit*

Dalam hal ini jika terdapat obyek berbukit-bukit, dapat menyebabkan kesulitan bagi aparat di dalam pengukuran guna kelengkapan data yang dibutuhkan.

3. *Wajib Pajak sebagian luar desa*

Dalam proses pengambilan data diperlukan juga kerja sama baik antara aparat pajak dengan wajib pajak itu sendiri untuk memperoleh keterangan-keterangan yang dibutuhkan mengenai obyek yang dikenakan pajak. Maka jika wajib pajak berada diluar desa, aparat pajak akan menemui kesulitan-kesulitan untuk dapat memperoleh keterangan-keterangan yang dibutuhkan.

4. *Kuantitas dan Kualitas aparat PBB masih kurang*

Keberhasilan suatu kegiatan adalah tergantung pada faktor manusia pelaksanaannya. Demikian juga dengan kegiatan pengenaan PBB, diperlukan personil-personil yang berpotensi, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Dari segi kuantitas, jumlah personil aparat PBB harus seimbang dengan volume pekerjaan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan tugas seperti yang diharapkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kualitas disini adalah bahwa aparat PBB harus terdiri dari personil-personil yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai.

Tetapi kenyataannya, jumlah aparat PBB masih belum mencukupi dengan volume pekerjaan yang ada, sehingga untuk pendataan dalam rangka SISMIOIP ini, perlu diambil tenaga dari luar (harian), dan untuk melatih tenaga tersebut dibutuhkan biaya dan waktu guna menjadi tenaga yang handal dalam bidangnya. Sedangkan mengenai tenaga penilai, tidak banyak jumlahnya sehingga hasil penilaian tidak maksimal mengingat jumlah obyek pajak yang harus dinilai.

### 5. *Minimnya Informasi yang diterima masyarakat*

Kebanyakan para wajib pajak banyak yang belum mengerti betul tujuan dilaksanakannya pengukuran dan pendataan dalam rangka SISMIOIP. Pada waktu dilakukan pengukuran oleh petugas, mereka (wajib pajak) sering mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang sama yaitu "Apakah PBB akan naik?". Para petugas menjelaskan bahwa pengukuran dan pendataan dilakukan untuk memperbaharui data, agar lebih tertib. Jadi ada persepsi yang keliru dari masyarakat tentang arti pengukuran dan pendataan.

Memang tidak dapat dipungkiri jika pada kenyataannya jumlah PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak cenderung meningkat atau minimal tetap. Hal tersebut terjadi karena tiap nilai tanah cenderung naik karena jumlah tanah tetap sedang manusia berkembang terus, sedang dasar pengenaan PBB itu sendiri didasarkan atas nilai tanah dan bangunan.

Kekeliruan dan kekurangan informasi tersebut mungkin disebabkan minimnya informasi atau bisa juga dari tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat terutama didaerah pedesaan.

## 6. *Kurangnya kesadaran Wajib Pajak*

Suatu kegiatan antara dua belah pihak dapat berjalan dengan baik apabila ada kerjasama antara dua belah pihak. Dalam pelaksanaan pengukuran dan pendataan obyek pajak juga tidak akan berjalan dengan baik dan tercapai tujuannya jika tidak ada kerja sama dengan wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya, wajib pajak terkadang sulit untuk dimintai keterangan tentang kepemilikannya. Pengisian data-data yang benar tentang kepemilikan sangat diperlukan, sebab jika data-data yang diberikan salah maka wajib pajak sendiri yang akan dirugikan. Apabila pada akhirnya penetapan PBB yang diterima lebih kecil tidak jadi masalah, tetapi jika penetapan PBB yang diterima lebih besar maka wajib pajak sendiri yang akan dirugikan, untuk mengurus keberatan, restitusi dan lain-lain.

## 7. *Kurangnya dana yang tersedia*

Kurang tersedianya dana yang memadai untuk pendataan dan hanya mengandalkan dana dari Blaya Operasional (BO) KP PBB Situbondo yang berasal dari pemerintah pusat.

Peranan dana dari Pemda dari hasil penarikan PBB perlu diinformasikan ke Pemda Tk II setempat.

## 4.5 Alternatif Pemecahan Masalah

### 1. *Pendataan lebih diaktifkan*

Jumlah obyek dan subyek yang sangat besar dalam pengenaan PBB merupakan keuntungan tersendiri, tetapi dilain pihak juga menimbulkan kesulitan terutama dalam hal pendataan dan penilaian. Terjadinya hal ini disebabkan jumlah aparat PBB terbatas dan juga situasi dan kondisi tiap-tiap obyek pajak yang memungkinkan belum terjaring subyek pajak menjadi wajib pajak, terutama didaerah pedesaan, walaupun berpotensi besar.

Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut dengan cara menambah petugas pendata dan penilai, juga harus lebih mengaktifkan pelaksanaan pendataan maksudnya yaitu dengan melaksanakan

intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan secara periodik, sebab dengan cara itulah perkembangan obyek dan subyek pajak dapat dipantau serta kemungkinan lolosnya subyek pajak lebih diperkecil atau dihindari, sehingga penerimaan PBB dapat lebih ditingkatkan, namun hal itu tergantung pula pada jumlah dana yang disediakan untuk pendataan.

### 2. Berpedoman pada peta desa / kelurahan serta Optimalisasi Pengawasan

Dengan berpedoman pada peta desa / kelurahan maka petugas pendata dan penilai dapat menghindari dari kesalahan pekerjaan dan kepastian batas-batas blok dari obyek berbukit tersebut yang terlebih dahulu diadakan orientasi lapangan secara bersama-sama oleh para pengawas dan petugas lapangan.

### 3. Koordinasi dengan kuasanya ( wajib pajak ) dan perangkat desa / kelurahan

Pada saat menyampaikan SPOP jika wajib pajak tidak berada ditempat atau wajib pajak bermukim diluar desa maka petugas dapat meminta pada orang yang diberi kuasa oleh si wajib pajak untuk mengisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditanda tangani oleh kuasanya.

Apabila kuasanya tidak ada maka SPOP dapat dibuat rangkap dua, yang satu ditinggal untuk diisi oleh wajib pajak atau kuasanya dan yang satu lagi diisi dan dibawa petugas untuk keperluan data entry. SPOP yang ditinggal terlebih dahulu harus diisi NOP-nya oleh petugas.

Bila wajib pajak / kuasanya tidak diketahui pada saat pendataan maka petugas lapangan harus meminta bantuan perangkat desa / kelurahan untuk menyelesaikann masalahnya.

### 4. Meningkatkan Kualitas aparat PBB

Seiring dengan majunya perkembangan jaman masyarakat (wajib pajak PBB) semakin kritis. Mereka tidak dapat menerima begitu saja pajak



yang dibebankan tanpa adanya bukti-bukti yang pasti baik secara hitungan matematik maupun hukum.

Oleh karena itu dibutuhkan tersedianya aparat PBB yang semakin berkualitas, sehingga dapat mengikuti perkembangan masyarakat PBB.

Untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pendata dalam proyek SISMIOP, tidak menjadi masalah apabila tenaga-tenaga dari luar dilibatkan. Tetapi perlu diutamakan yang memiliki latar pendidikan dan pengalaman tentang pengukuran dan pengetahuan bahan bangunan. Dan perlu pula latihan yang intensif, selain untuk menciptakan fiscus PBB yang berkualitas maka dalam lingkungan PBB sendiri perlu juga secara periodik dan berkesinambungan untuk mengirim pegawainya yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk melanjutkan program belajar kedinasan khususnya dibidang penilaian dan pengukuran.

### 5. *Meningkatkan kualitas penyuluhan kepada masyarakat*

Didalam pelaksanaan pengenaan PBB ada dua belah pihak yang terlibat didalamnya yaitu petugas pajak dan wajib pajak. Tidaklah mungkin pelaksanaan pengenaan PBB akan berjalan lancar tanpa dukungan wajib pajak. Keterbatasan tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak serta kurang meratanya informasi, tidak jarang terjadi perbedaan penafsiran terhadap kebijaksanaan pemerintah tentang PBB.

Sebab itu penyuluhan kepada masyarakat sangat diperlukan terutama pada masyarakat pedesaan yang minim pengetahuannya dan mungkin bahkan tidak mempunyai sama sekali pengetahuan dibidang perpajakan, khususnya PBB.

Pemberian informasi dapat dilakukan dengan :

- a. Memberi penyuluhan langsung kepada masyarakat.
- b. Memberi informasi melalui spanduk dan selebaran yang dipasang dan disebarakan ditempat yang strategis dan dianggap perlu.

- c. Memberi penyuluhan melalui media informasi baik dari media cetak (surat kabar, buku, dll) maupun media elektronika (televisi, radio).
- d. Untuk masyarakat pedesaan dapat diberikan informasi melalui kesenian daerah, misalnya ludruk, wayang kulit dengan cara menyelipkan pesan-pesan mengenai pajak didalamnya.

Agar tujuan dapat segera dicapai hendaknya dilakukan secara terus menerus.

6. *Pendekatan Persuasif kepada masyarakat terhadap pentingnya SISMIOP serta memberikan peringatan dan sanksi yang tegas kepada aparat yang lalai*

Untuk menanggulangi masalah kurangnya kerjasama dan kesadaran wajib pajak dapat diatasi dengan pemberian penyuluhan sebagaimana yang telah dibahas diatas, tetapi apabila dengan cara tersebut masih belum terselesaikan maka dapat diambil cara lain yaitu dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat mengenai pentingnya program SISMIOP yang merupakan suatu kepentingan, baik bagi wajib pajak sendiri maupun pemerintah. Oleh sebab itu kerjasama dan kesadaran dari wajib pajak sangatlah dibutuhkan. Dan bagi aparat yang lalai maka akan diberikan peringatan dan sanksi yang tegas. Apabila wajib pajak dan aparat PBB sudah mengetahui kewajibannya masing-masing maka kelancaran pelaksanaan pendataan dapat tercapai.

7. *Tersedianya dana yang memadai*

Tersedianya dana yang memadai untuk melaksanakan pendataan bukan hanya dari Biaya Operasional (BO) KP PBB Situbondo yang berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga diharapkan dari dana Pemda Tk II yang dapat diambil dari hasil penerimaan PBB dari daerah yang bersangkutan guna menggali potensi PBB yang belum terjangkau.

## BAB V

### KE Simpulan dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sektor penerimaan negara dibidang pajak yang memegang peranan penting.

Ini disebabkan karena obyek dan subyek PBB yang sangat luas dan jumlahnya besar. Hal ini berakibat administrasi menjadi kurang tertib, sehingga diperlukan adanya suatu sistem pengolahan PBB yang mudah, efektif dan efisien dan sistem ini disebut Sistem Manajemen dan Informasi Obyek Pajak (SISMIOP).

Dengan adanya sistem ini akan terwujud administrasi PBB yang lebih tertib, menjaring subyek pajak baru dan diharapkan penerimaan PBB dapat meningkat.

Guna menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi, diperlukan adanya kerjasama dan kerja keras dari semua pihak yang terkait dan beberapa langkah pemecahan yaitu :

1. Mengaktifkan pendataan, dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan guna mencegah lolosnya subyek pajak untuk menjadi wajib pajak.
2. Berpedoman pada peta desa / kelurahan yang tersedia serta optimalisasi pengawasan.
3. Koordinasi dengan kuasa si wajib pajak dan perangkat desa / kelurahan, sehingga proses tidak terhambat dan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
4. Meningkatkan kualitas aparat PBB khususnya untuk tenaga pendata dan penilai. Untuk petugas pendata perlu diberi pelatihan secara intensif dan bekal pengetahuan yang memadai tentang bahan bangunan, sehingga akurasi pendataan dan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Memberikan / meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengerti tentang PBB dan tidak mempunyai pengertian yang salah terhadap hal tersebut.
6. Pendekatan persuasif kepada masyarakat, terhadap pentingnya SISMIOP serta memberikan peringatan dan sanksi yang tegas kepada aparat yang lalai, sehingga mereka mempunyai kesadaran untuk bekerja sama dalam membantu kelancaran proses SISMIOP tersebut.
7. Koordinasi dari Pemda Tk II untuk memperoleh dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna melaksanakan SISMIOP.

Dengan beberapa alternatif pemecahan masalah diatas maka diharapkan proses penertiban PBB dapat terlaksana dengan lancar dan dapat meningkatkan penerimaan disektor pajak.

### 5.2 Saran

Guna tercapainya tertib administrasi PBB, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB, Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu sistem pengadministrasian yang disebut SISMIOP, yang dimasukkan sebagai salah satu program pemerintah.

Sistem ini sebenarnya sangat diperlukan mengingat jumlah obyek pajak yang sangat besar. Penulis menyarankan agar pelaksanaan SISMIOP ini tidak hanya di beberapa bagian wilayah, namun dapat dilaksanakan pada seluruh wilayah Kabupaten dati II Situbondo yang merupakan wilayah kerja KP PBB Situbondo secara bertahap dan berkesinambungan antara wilayah - wilayah yang berbatasan, sehingga tertib administrasi dan penggalian potensi pajak akan berjalan seiring, walaupun untuk pelaksanaannya kita sadari akan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Dan akhirnya, penulis hanya dapat berharap agar dengan pelaksanaan sistem yang masih terbilang baru ini dapat memudahkan semua pihak yang berhubungan dengan PBB.



DAFTAR PUSTAKA

- Atep Adya Barata, 1992. Seri Perpajakan 4 , *Pajak Bumi dan Bangunan*.  
Editor : Santoso, Palal M Dr. SE, MA.
- Hadi, S. 1979. *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo , 1995 . *Perpajakan* edisi 3 Yogyakarta : Andi Offset .
- Marzuki, 1995. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : FE - UII.
- Nasir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Gahlia Indonesia.
- Nasucha, C (Ed). C.D. Sutman (Ed). S. Henryanto (Ed) dan M.I. Ali (Ed). 1999  
*Tanya Jawab dan Ilustrasi Solusi Perpajakan Terlengkap*. Jakarta  
: Kerjasama Majalah Berita Pajak dengan Ikatan Sarjana Ekonomi  
Indonesia Komisariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak ( SISMIO ), buku I. Petunjuk  
Pembentukan Basis Data Departemen Keuangan RI, Dirjen Pajak.  
Dirjen PBB, Jakarta 1993.
- Tim SISMIO KP PBB Situbondo, Rencana Kerja Pembentukan Basis Data  
Obyek dan Subyek PBB Pola SISMIO di Kecamatan Mlandingan  
daerah Tingkat II Situbondo, Tahun anggaran 1999 / 2000.

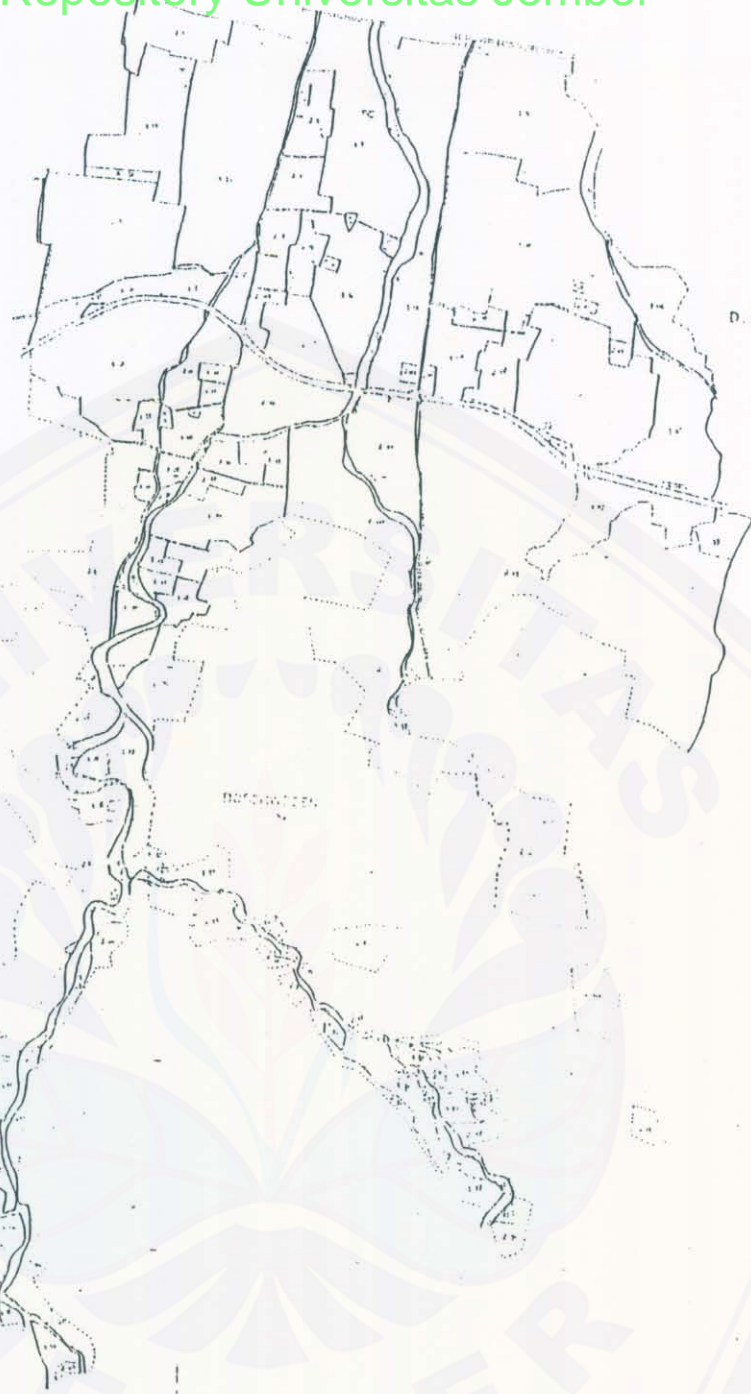


<table border="1"> <tr> <td>NO. SURTA</td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL SURTA</td> <td>1953</td> </tr> <tr> <td>DESA</td> <td>SUHADA</td> </tr> <tr> <td>KECAMATAN</td> <td>SELAMUKTI</td> </tr> <tr> <td>KABUPATEN</td> <td>SITUBONDO</td> </tr> <tr> <td>NO. SURTA</td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL SURTA</td> <td>1953</td> </tr> </table>	NO. SURTA	159	TANGGAL SURTA	1953	DESA	SUHADA	KECAMATAN	SELAMUKTI	KABUPATEN	SITUBONDO	NO. SURTA	159	TANGGAL SURTA	1953	<p>KETERANGAN</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100</p>	<p>LEGENDA:</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100</p>	<p>DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p> <p>KP. P. 01</p> <p>KAB. KODYA SITUBONDO</p> <p>KECAMATAN SELAMUKTI</p> <p>DESA/KEL. SELAMUKTI</p> <p>KODE VII. 35 12 055 001</p> <p>NO. LEGISLATIF 01</p> <p>JML. LEMBAR 01 ( satu lembar )</p>
NO. SURTA	159																
TANGGAL SURTA	1953																
DESA	SUHADA																
KECAMATAN	SELAMUKTI																
KABUPATEN	SITUBONDO																
NO. SURTA	159																
TANGGAL SURTA	1953																

D. SELOMUKO

D. TREEUHAN

D. SUMBERANYAR



SUMBERPINANG

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK TAHUN 2016	
TH. DIBER REVISI DIBAGAI	1999 SENIDI D. I. N. H. 1
DIREKSI	S. H. H. A. A. 09/12/2016
INSPEKSI	KEPALA KP. PHE. 09/12/2016 137.09.03.2021



LEGENDA :

<ul style="list-style-type: none"> <li>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. BUNYI BUNYI</li> <li>2. BUNYI BUNYI</li> <li>3. BUNYI BUNYI</li> <li>4. BUNYI BUNYI</li> <li>5. BUNYI BUNYI</li> <li>6. BUNYI BUNYI</li> <li>7. BUNYI BUNYI</li> <li>8. BUNYI BUNYI</li> <li>9. BUNYI BUNYI</li> <li>10. BUNYI BUNYI</li> <li>11. BUNYI BUNYI</li> <li>12. BUNYI BUNYI</li> <li>13. BUNYI BUNYI</li> <li>14. BUNYI BUNYI</li> <li>15. BUNYI BUNYI</li> <li>16. BUNYI BUNYI</li> <li>17. BUNYI BUNYI</li> <li>18. BUNYI BUNYI</li> <li>19. BUNYI BUNYI</li> <li>20. BUNYI BUNYI</li> <li>21. BUNYI BUNYI</li> <li>22. BUNYI BUNYI</li> <li>23. BUNYI BUNYI</li> <li>24. BUNYI BUNYI</li> <li>25. BUNYI BUNYI</li> <li>26. BUNYI BUNYI</li> <li>27. BUNYI BUNYI</li> <li>28. BUNYI BUNYI</li> <li>29. BUNYI BUNYI</li> <li>30. BUNYI BUNYI</li> <li>31. BUNYI BUNYI</li> <li>32. BUNYI BUNYI</li> <li>33. BUNYI BUNYI</li> <li>34. BUNYI BUNYI</li> <li>35. BUNYI BUNYI</li> <li>36. BUNYI BUNYI</li> <li>37. BUNYI BUNYI</li> <li>38. BUNYI BUNYI</li> <li>39. BUNYI BUNYI</li> <li>40. BUNYI BUNYI</li> <li>41. BUNYI BUNYI</li> <li>42. BUNYI BUNYI</li> <li>43. BUNYI BUNYI</li> <li>44. BUNYI BUNYI</li> <li>45. BUNYI BUNYI</li> <li>46. BUNYI BUNYI</li> <li>47. BUNYI BUNYI</li> <li>48. BUNYI BUNYI</li> <li>49. BUNYI BUNYI</li> <li>50. BUNYI BUNYI</li> <li>51. BUNYI BUNYI</li> <li>52. BUNYI BUNYI</li> <li>53. BUNYI BUNYI</li> <li>54. BUNYI BUNYI</li> <li>55. BUNYI BUNYI</li> <li>56. BUNYI BUNYI</li> <li>57. BUNYI BUNYI</li> <li>58. BUNYI BUNYI</li> <li>59. BUNYI BUNYI</li> <li>60. BUNYI BUNYI</li> <li>61. BUNYI BUNYI</li> <li>62. BUNYI BUNYI</li> <li>63. BUNYI BUNYI</li> <li>64. BUNYI BUNYI</li> <li>65. BUNYI BUNYI</li> <li>66. BUNYI BUNYI</li> <li>67. BUNYI BUNYI</li> <li>68. BUNYI BUNYI</li> <li>69. BUNYI BUNYI</li> <li>70. BUNYI BUNYI</li> <li>71. BUNYI BUNYI</li> <li>72. BUNYI BUNYI</li> <li>73. BUNYI BUNYI</li> <li>74. BUNYI BUNYI</li> <li>75. BUNYI BUNYI</li> <li>76. BUNYI BUNYI</li> <li>77. BUNYI BUNYI</li> <li>78. BUNYI BUNYI</li> <li>79. BUNYI BUNYI</li> <li>80. BUNYI BUNYI</li> <li>81. BUNYI BUNYI</li> <li>82. BUNYI BUNYI</li> <li>83. BUNYI BUNYI</li> <li>84. BUNYI BUNYI</li> <li>85. BUNYI BUNYI</li> <li>86. BUNYI BUNYI</li> <li>87. BUNYI BUNYI</li> <li>88. BUNYI BUNYI</li> <li>89. BUNYI BUNYI</li> <li>90. BUNYI BUNYI</li> <li>91. BUNYI BUNYI</li> <li>92. BUNYI BUNYI</li> <li>93. BUNYI BUNYI</li> <li>94. BUNYI BUNYI</li> <li>95. BUNYI BUNYI</li> <li>96. BUNYI BUNYI</li> <li>97. BUNYI BUNYI</li> <li>98. BUNYI BUNYI</li> <li>99. BUNYI BUNYI</li> <li>100. BUNYI BUNYI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. MAS. H.</li> <li>2. GEREJA</li> <li>3. KANTOR</li> <li>4. KANTOR</li> <li>5. KANTOR</li> <li>6. KANTOR</li> <li>7. KANTOR</li> <li>8. KANTOR</li> <li>9. KANTOR</li> <li>10. KANTOR</li> <li>11. KANTOR</li> <li>12. KANTOR</li> <li>13. KANTOR</li> <li>14. KANTOR</li> <li>15. KANTOR</li> <li>16. KANTOR</li> <li>17. KANTOR</li> <li>18. KANTOR</li> <li>19. KANTOR</li> <li>20. KANTOR</li> <li>21. KANTOR</li> <li>22. KANTOR</li> <li>23. KANTOR</li> <li>24. KANTOR</li> <li>25. KANTOR</li> <li>26. KANTOR</li> <li>27. KANTOR</li> <li>28. KANTOR</li> <li>29. KANTOR</li> <li>30. KANTOR</li> <li>31. KANTOR</li> <li>32. KANTOR</li> <li>33. KANTOR</li> <li>34. KANTOR</li> <li>35. KANTOR</li> <li>36. KANTOR</li> <li>37. KANTOR</li> <li>38. KANTOR</li> <li>39. KANTOR</li> <li>40. KANTOR</li> <li>41. KANTOR</li> <li>42. KANTOR</li> <li>43. KANTOR</li> <li>44. KANTOR</li> <li>45. KANTOR</li> <li>46. KANTOR</li> <li>47. KANTOR</li> <li>48. KANTOR</li> <li>49. KANTOR</li> <li>50. KANTOR</li> <li>51. KANTOR</li> <li>52. KANTOR</li> <li>53. KANTOR</li> <li>54. KANTOR</li> <li>55. KANTOR</li> <li>56. KANTOR</li> <li>57. KANTOR</li> <li>58. KANTOR</li> <li>59. KANTOR</li> <li>60. KANTOR</li> <li>61. KANTOR</li> <li>62. KANTOR</li> <li>63. KANTOR</li> <li>64. KANTOR</li> <li>65. KANTOR</li> <li>66. KANTOR</li> <li>67. KANTOR</li> <li>68. KANTOR</li> <li>69. KANTOR</li> <li>70. KANTOR</li> <li>71. KANTOR</li> <li>72. KANTOR</li> <li>73. KANTOR</li> <li>74. KANTOR</li> <li>75. KANTOR</li> <li>76. KANTOR</li> <li>77. KANTOR</li> <li>78. KANTOR</li> <li>79. KANTOR</li> <li>80. KANTOR</li> <li>81. KANTOR</li> <li>82. KANTOR</li> <li>83. KANTOR</li> <li>84. KANTOR</li> <li>85. KANTOR</li> <li>86. KANTOR</li> <li>87. KANTOR</li> <li>88. KANTOR</li> <li>89. KANTOR</li> <li>90. KANTOR</li> <li>91. KANTOR</li> <li>92. KANTOR</li> <li>93. KANTOR</li> <li>94. KANTOR</li> <li>95. KANTOR</li> <li>96. KANTOR</li> <li>97. KANTOR</li> <li>98. KANTOR</li> <li>99. KANTOR</li> <li>100. KANTOR</li> </ul>
---	--	---

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JEMBARAN PAJAK KP PBR SILEMUNG	
KAP. KUDYA	SILEMUNG
PE. AMATAN	PE. AMATAN
DES. AKRI	SUMBERPINANG
KOH. VII	35 12 052 003
NO. LEMBAR	01
NO. LEMBAR	01 (only 1 sheet)





D. TREBUNGAN

D. SELOWOGO

D. CAMPOAN

D. ALASEANUR

<p>NO. 599</p> <p>NO. 599</p> <p>CAD. 1:5000</p> <p>EMPERAKA</p> <p>CAD. 1:5000</p>	<p>SEKTOR C.1</p> <p>JOHANE'S SW. NIP. 050015630 KEPALA KPP DESA SUMBERANYAR</p> <p>Drs. H. HARJO NIP. 050015630</p>	 <p>KETERANGAN PETA INI DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN DATA DASAR DARI KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	<p>U</p> <p>SKALA 1:5000</p> <p>0 1 2 3 4 5</p>	<p>LEGENDA</p> <p>HOANG BUKIT</p> <p>TITIK TINGGI</p> <p>BATAS BLOK</p> <p>BATAS DESA</p> <p>BATAS KECAMATAN</p> <p>JALAN KERATAAN</p> <p>JALAN RAYA</p> <p>JALAN KAMPUNG</p> <p>SUNGAI</p> <p>SALURAN AIR</p> <p>MASJID</p> <p>GENEJA</p> <p>KEMENGG</p> <p>PERUMAHAN RUMAH</p> <p>PERUMAHAN KRISTEN</p> <p>SURABAN BUDHATUNGGAL</p> <p>HUKUM SAKIT</p> <p>HOTEL</p> <p>SEKOLAH</p> <p>KANTOR PEMERINTAHAN</p> <p>TEMPAT BERIBADAH</p>	 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KCP. PDB.</p> <p>KAB. Jember</p> <p>KECAMATAN</p> <p>DESA/KEL.</p> <p>KODE WIL.</p> <p>NO. LEMBAR</p> <p>JML. LEMBAR</p>	<p>SITUBONDO</p> <p>MILANDINGSAT</p> <p>SUMBERANYAR</p> <p>35.12.050.004</p> <p>01</p> <p>11 ( satu lembar )</p>
---	--	--	---	---	--	--

Digital Repository Universitas Jember



TAKRIK BERKAS	1560
TAKRIK DIGAMP. VII	1550
DICAMP. IIR	YOHANES SW
OPERENKSA	SEHIDI DJAJUMI NIP. 060031987
DISKUSI. IIR	Drs. HUSWADI NIP. 060042071

**KETERANGAN**  
PETA BERBENTUK BINGKAI MENYERUPAI  
GUNAKAN SE PETA DASAR DAN  
TAMBAH RABIA D. III

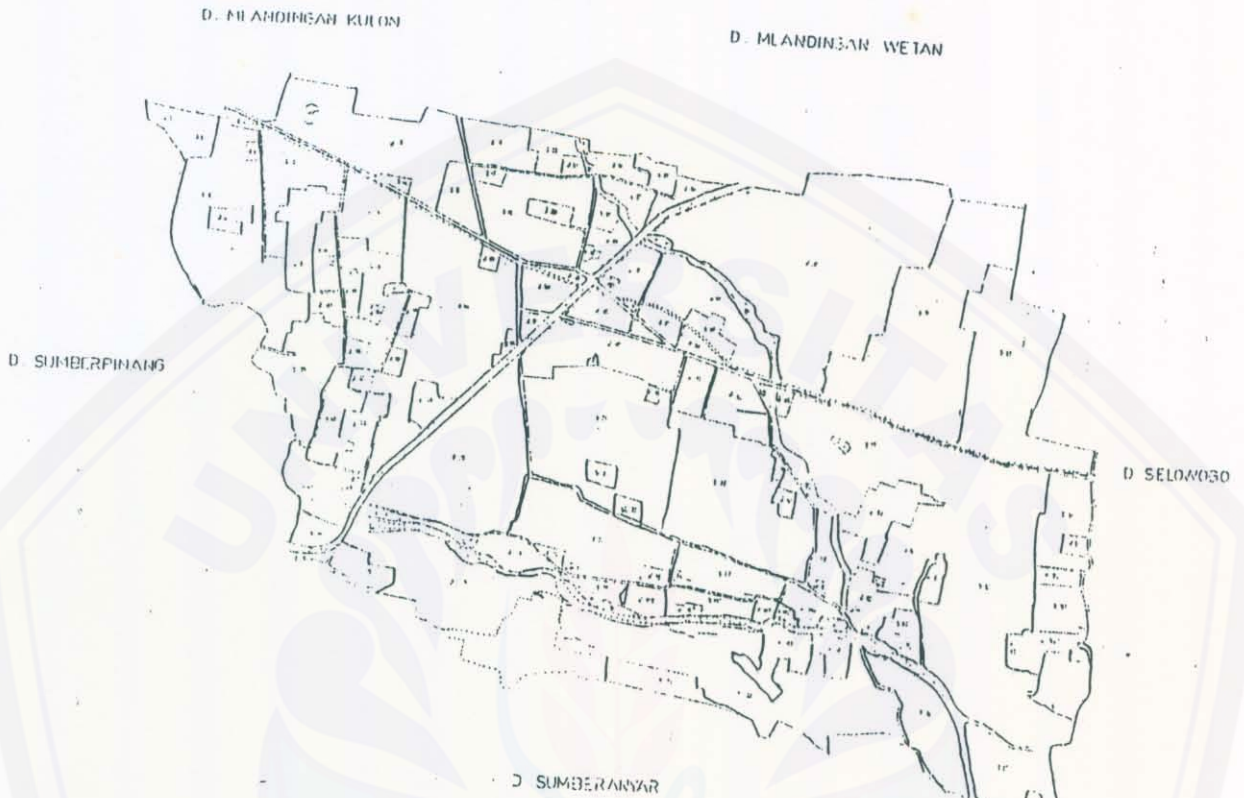
U  
SKALA 1:5000  
0 1 2 3 4 5

**LEGENDA:**

- 1. 2 3 NOMOR BLOK
- ▲ TITIK TRIANGULASI
- BATAS BLOK
- BATAS DESAKREI
- BATAS KECAMATAN
- BATAS KAB. KODYA
- JALAN KERETA API
- JALAN RAYA
- JALAN KAMPUNG
- BUNDAI
- SALURAN AIR
- MASJID
- GEREJA
- KEMENJENG
- KUBURAN ISLAM
- KUBURAN KRISTEN
- KUBURAN BUHARIONG
- RUMAH SAKIT
- HOTEL
- SEAGLAI
- KANTOR PEMERINTAHAN
- POLY. HENJIN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
K.P. P.B.

KAB. KODYA	SITUBONDHO
KECAMATAN	MLANDINGAN
DES/KEJEL.	CAMPDAN
KODE WIL.	35.12.050 <b>005</b>
NO LEMBAR	01
JML LEMBAR	01 (1 lembar)



NO. SKALA	1:5000
TANGGAL	1959
PROJEKSI	YONIANIS 500
NO. SURTI	SENTRI DAERAH NO. 06051187
NO. DAFTAR	SEKALAH PIRI SITUBONDO
NO. KARTU	DRS. TUNAWADI TRP. 06051187



**KETERANGAN**  
PETA YANG DIBUAT DENGAN MEMBUKUKAN PETA DASAR DAN  
PERTINGKATAN 1:5000

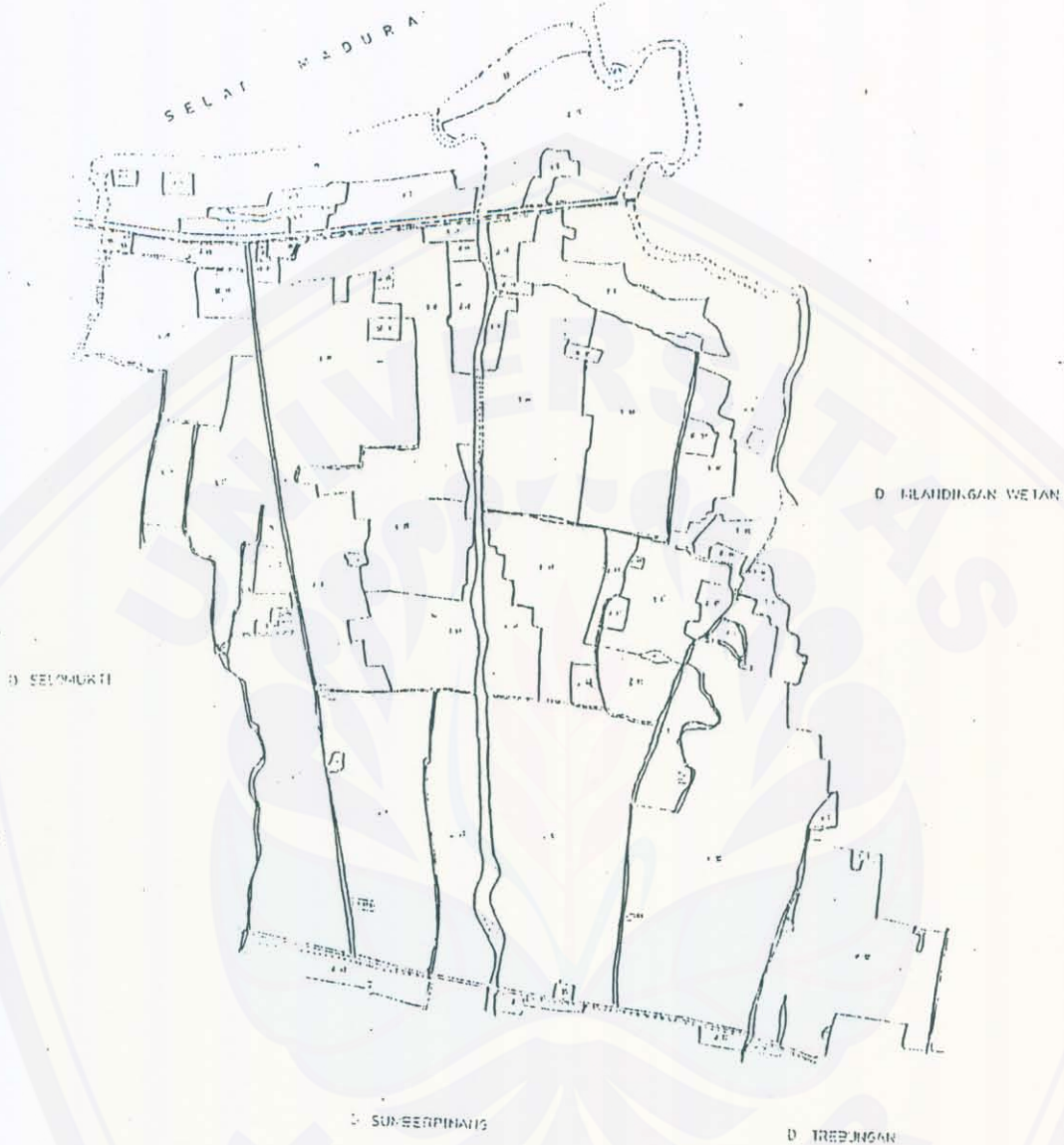


**LEGENDA:**

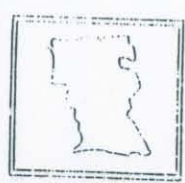
- 1 2 3 NOMOR BLOK
- ▲ TITIK TRIANGGULASI
- BATAS BLOK
- BATAS DESAKEL
- BATAS KECAMATAN
- BATAS KAB. KODYA
- BATAS KANTON
- JALAN KERETA API
- JALAN RAYA
- JALAN KAMPUNG
- SUNGAI
- SALURAN AIR
- ☪ MAS JEM
- ☪ GEREJA
- ☪ KLENTERE
- ☪ KUBURAN ISLAM
- ☪ KUBURAN KRISTEN
- ☪ KUBURAN BUDHA/INDO
- ☪ RUMAH SAKIT
- ☪ HOTEL
- ☪ SEKOLAH
- ☪ KANTOR PEMERINTAHAN
- ☪ POLICE STATION



DEPARTEMEN KEJURUAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAJ KP. PBJ.	
KAB. KODYA	SITUBONDO
KECAMATAN	MLANDINGAN
DESAKEL	TREBUNGAN
KODE WIL.	35 12 050 008
NO. LEMBAR	01 (1 lembar)
JML. LEMBAR	01 (1 lembar)



1)	2)
SURABAYA	
SENTOT DJAJAH HP 060051937 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG	
DESA MLANDINGAN KECAMATAN MLANDINGAN	



**KETERANGAN**  
 PETAK BLOK DIBERHASILKAN DARI  
 GUNAKAN PETA DASAR DARI  
 SKALA 1:5000



**LEGENDA :**

- 1 2 3 NOMOR BLOK
- ▲ TITIK TRIANGULASI
- BATAS BLOK
- BATAS DESAKEL
- BATAS KECAMATAN
- BATAS KABUPATEN
- JALAN KERETA API
- JALAN RAYA
- JALAN KAMPUNG
- SUNGAI
- SALURAN AIR
- Ⓜ MAT. RD
- Ⓜ GER. TA
- Ⓜ KEM. HJ
- Ⓜ KUBUNYU KEDAK
- Ⓜ KUBUNYU KRISTEN
- Ⓜ KUBUNYU BUDHA/BUDDHIS
- Ⓜ RUMAH SAKIT
- Ⓜ HOTEL
- Ⓜ SENDUK
- Ⓜ KANTOR PEMERINTAHAN
- Ⓜ POLY. KANTON



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KP. P11B.	
KABUPATEN	SITUBONDO
KECAMATAN	MLANDINGAN
DESAKEL	MLANDINGAN KULON
KODE VIL.	35.12.050 <b>009</b>
NO. LEMBAR	01

**SISMIOP 1999 / 2000**

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah Obyek Pajak		
		Semula	Rencana	Realisasi
1.	Selomukti	2.686	2.959	3.429
2.	Sumber Pinang	1.193	1.371	1.426
3.	Sumber Anyar	1.259	1.510	2.420
4.	Campoan	826	1.035	1.472
5.	Trembungan	1.714	2.071	2.012
6.	Mlandingan Kulon	1.317	1.581	1.451
7.*	Alas Banyur	-	-	-
<b>Kecamatan Mlandingan</b>		<b>8.997</b>	<b>10.527</b>	<b>12.210</b>

keterangan 7.\* Tidak termasuk karena keterbatasan dana

**Perbandingan Luas Wilayah dengan Luas Bumi yang telah dikenakan PBB pada wilayah pelaksanaan SISMIOP**

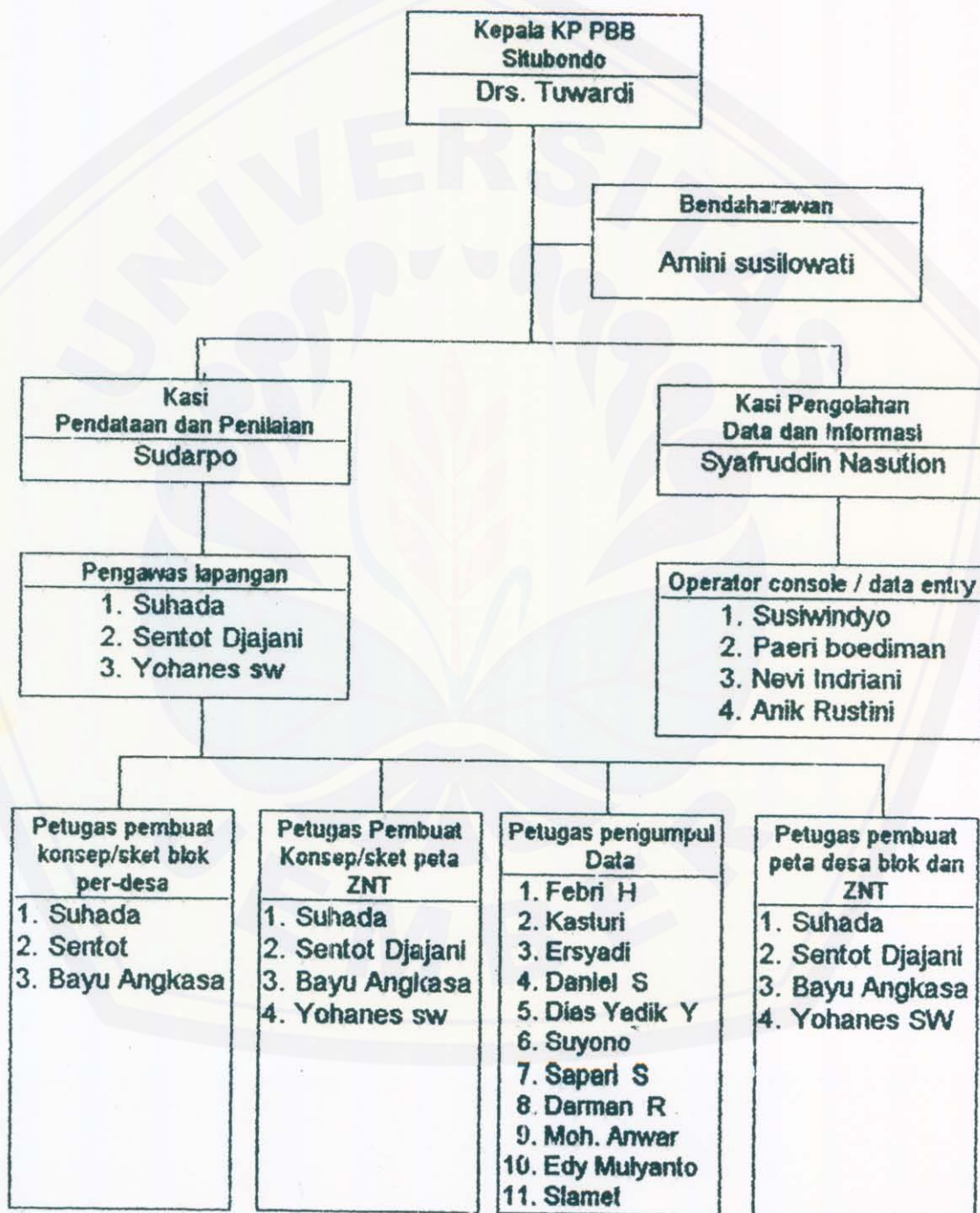
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (m <sup>2</sup> )	Luas Bumi kena PBB (m <sup>2</sup> )	%
1	2	3	4	5 (4 : 3)
1.	Mlandingan (kecuali Alas Bayur)	76.570.000	20.096.822	26,25 %
<b>Jumlah</b>		<b>76.570.000</b>	<b>20.096.822</b>	<b>26,25 %</b>

Perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah wajib pajak pada wilayah pelaksanaan SISMIOP

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib Pajak/Obyek Pajak		%	
			Sebelum SISMIOP	Sesudah SISMIOP	(4:3)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mlandingan (kecuali Alas Bayur)	19.702	8.997	12.210	45,67 %	61,97 %
	Jumlah		8.997	12.210		

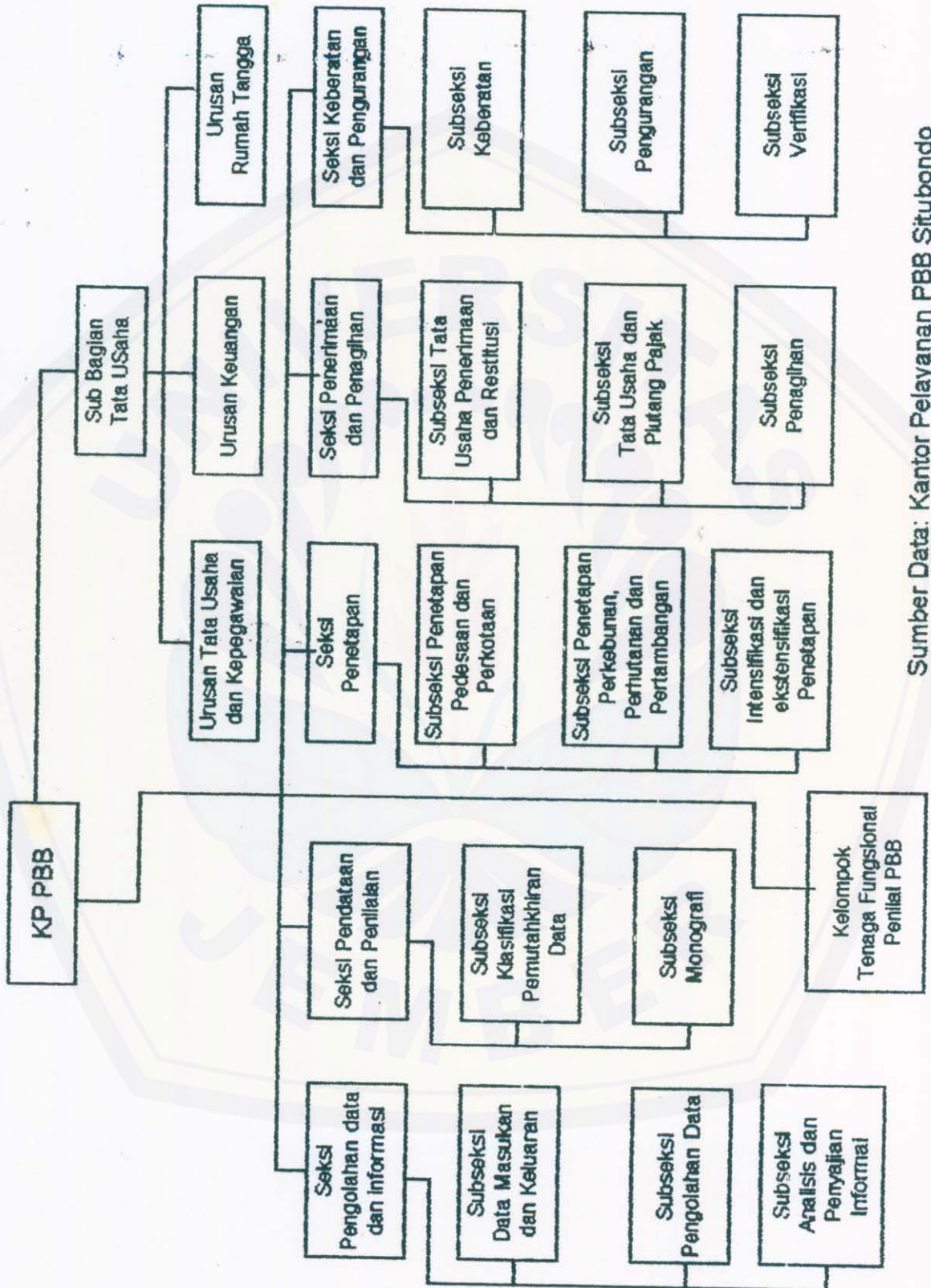
Nota : - Data tersebut menurut keadaan per 01 Januari 1999  
 - Data tersebut termasuk pokok ketetapan bangunan  
 - Data tersebut tidak termasuk Obyek Perikanan

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PEMBENTUKAN OBYEK / SUBYEK PBB POLA SISMIOP**  
**KANTOR PELAYANAN PBB SITUBONDO**





**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TIPE A**



Sumber Data: Kantor Pelayanan PBB Situbondo



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 331342 Jember 68121  
Email : fisipunej@jember.wasantara.net.id

No m o r : 3079 /PT32. H6.FISIP/17'99  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Pelaksanaan kegiatan Magang

Jember, 23 Desember 1999

Kepada Yth:  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Bumi Dan Bangunan Situbondo  
Jl. Argopuro No. 41  
di -

SITUBONDO

Menindak lanjuti persetujuan Surat Saudara No.S.5272/WPJ.09/KB.1401/1999 dan memperhatikan surat Kakarwil IX DJP Jawa Timur No. S-851 /WPJ.09/DC.0102/1999 tertanggal 9 November 1999, perihal persetujuan permohonan kegiatan magang mahasiswa D-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Pajak Situbondo, maka dengan ini kami menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan magang ( Surat Tugas Terlampir ) sesuai dengan jadwal.

Selanjutnya pengaturan jadwal dan pelaksanaan magang sepenuhnya kami serahkan kepada saudara sesuai dengan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Kami berharap selama melaksanakan magang mahasiswa diberi kesempatan untuk praktek disetiap seksi yang ada di KPP Situbondo Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih



Dekan  
Dekan II.

Matnur Haryono  
Telp. 130 531 992

Tembusan kepada :

1. Kepala Pusat Penyuluhan Pajak  
Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah IX DJP  
Jawa Timur - di Surabaya



Surat Tugas

Nomor : 3089/PT32.H6.FISIP/17'99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
mengumumkan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Hestiana Eka L.	97-1129	Ketua
2	Annisa	97-1153	Wakil Ketua
3	Indah Liliana	97-1107	Anggota
4	Sisyanti Octarini	97-1157	Anggota
5	Elly Sulastriningsih	97-1132	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Situbondo selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari sampai dengan 26 Februari 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Situbondo.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jember, 29 Desember 1999



Pembantu Dekan II,

Dr. Matnur Haryono

NIP. 130 351 992

PESERTA PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
 FISIP UNIVERSITAS JEMBER  
 MAHASISWA MAGANG TAHUN : 2000 / 2001

KPK/PPBB : SITUBONDO .....  
 NAMA : ANNISA .....  
 NPM : 97-1153 .....

NO.	TANGGAL	SEKSI/SUB	HARI KE DARI JAM SAMPAI JAM :	TUGAS	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASIKASUBSI
1	26-01-2000	Penetapan	07.15-12.00	Memasukan data SKKB	Mencatat & Meng- oreksi	5	93	<i>[Signature]</i>
2	31-01-2000		13.30-16.00					
2	01-02-2000	PDI	07.15-12.00	Mengoreksi data SPPT	Mencocokkan	5	90	<i>[Signature]</i>
3	05-02-2000		13.30-16.00					
3	07-02-2000	PEDANIL	07.15-12.00	Memasukan data properti	Mencatat	5	94	<i>[Signature]</i>
4	11-02-2000		13.30-16.00					
4	12-02-2000	P 2	07.15-12.00	Menghitung jml.penerimaan	Menghitung	5	94	<i>[Signature]</i>
5	16-02-2000		13.30-16.00					
5	17-02-2000	T U	07.15-12.00	Mencatat kelu- ar masuk surat	Mencatat	5	89	<i>[Signature]</i>
6	21-02-2000		13.30-16.00					
6	22-02-2000	PST	07.15-12.00	Membuat daftar perbaikan data	membuat daftar	5	90	<i>[Signature]</i>
	26-02-2000		13.30-16.00					
<b>JUMLAH</b>						30	550	
<b>RATA-RATA *</b>							91,6	

26 Februari 19..... 2000

KEPALA KPP/KPPBB SITUBONDO  
 Dte. TUWARDI  
 NIP. 060042071



KETERANGAN :  
 RATA-RATA \* = JUMLAH KOLOM 7  
 JUMLAH TANGGAL KEHADIRAN

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK  
 PESERTA PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
 FISIP UNIVERSITAS JEMBER  
 MAHASISWA MAGANG TAHUN : 2000...../2001 .....

KPP/KP PBB : SITUBONDO.....  
 NAMA : ANNISA.....  
 NPM : 97-1153.....

NO.	TANGGAL	SEKSI-SEKSI	PENGUASAAN MATERI PRAKTEK			RATA-RATA (4+5+6)/3	TANDA TANGAN KEPALA SEKSI	KETERANGAN
			PELAKSANAAN PEKERJAAN	URUTAN PEKERJAAN	DOKUMEN/BUKU /ARUS DOKUMEN			
1	2	3		5	6	7		9
1	26-01-2000	Penetapan				93	<i>[Signature]</i>	
	31-01-2000							
2	01-02-2000	PDI	90	91	89	90	<i>[Signature]</i>	
	05-02-2000					94	<i>[Signature]</i>	
3	07-02-2000	PEDANIL						
	11-02-2000					94	<i>[Signature]</i>	
4	12-02-2000	P 2	95	94	93			
	16-02-2000					89	<i>[Signature]</i>	
5	17-02-2000	T U	89	89	89			
	21-02-2000					90	<i>[Signature]</i>	
6	22-02-2000	PST	93	87	90			
	26-02-2000							
TOTAL						550		
RATA-RATA*						91,6		

26 Pebruari 19 2000  
 KEPALA KPP/KPPBB SITUBONDO  
  
 Drs. TUWARDI  
 NIP. 060042071

KETERANGAN :  
 RATA-RATA \* = JUMLAH KOLOM 7  
 JUMLAH TANGGAL KEHADIRAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SITUBONDO

Jl. Argopuwo No. 41 Situbondo 68322

Telepon (0338) 672167, 671969

Faksimil (0338) 673701

Nomor : S.5272/WPJ.09/KB.1401/1999  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Magang Mahasiswa  
D III Perpajakan FISIP Universitas Jember

9 November 1999

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Prodip III Perpajakan  
Universitas Jember

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 2355/PT.32.II4.FISIP/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa permohonan ijin magang untuk para Mahasiswa Prodip III Perpajakan FISIP Universitas Jember diterima sesuai dengan jadwal / waktu yang telah direncanakan.

Demikian untuk maklum dan seperlunya.

